

Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada MTsN Ciwaringin Cirebon

Yusup Umar

IAIN Syeh Nurjati Cirebon; yusufumar807@yahoo.com

JSTAF :

Siddiq, Tabligh, Amanah,
Fathonah

Vol 02 No 1 January 2023

Hal : 01-13

<https://doi.org/10.62515/staf.v2i1.174>

Received: 25 December 2022
Accepted: 30 December 2022
Published: 31 Januari 2023

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dengan reduksi data, display data dan kongklusi data. Adapun kesimpulannya yaitu: (1). Peran kepala sekolah dalam perencanaan sumber dana pembiayaan pendidikan sesuai dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, (2). Teknik Pembiayaan pendidikan mengutamakan hal-hal yang paling vital yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan (3). Pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan intern dan ektern. (4). Hambatan yang dialami, yaitu yang pertama berbedanya perencanaan dengan biaya yang diterima dari pemerintah, yang kedua pembayaran uang komite sekolah tidak terlaksana secara rutin

Kata kunci: manajemen, mutu pembelajaran, pembiayaan pendidikan

Abstract :

The purpose of this study is to find out and analyze about education financing management in improving the quality of learning at MTSN Ciwaringin Cirebon. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Its data collection techniques are with observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis is by reducing data, displaying data and concluding data. The conclusion is: (1). The role of the principal in planning the source of education financing funds in accordance with the post that has been given by the government, (2). Education financing techniques prioritize the most vital things needed by school organizations, thereby improving the quality and quality of education (3). Supervision of education financing is carried out internally and externally. (4). The obstacles experienced, namely the first is the difference between planning and the costs received from the government, the second is that the payment of school committee money is not carried out regularly

Keywords ; management, learning quality, education financing

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas) Bab I pasal 1 yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya menyangkut bangsa dan negara. Penjelasan yang disampaikan di atas mengamanatkan pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.

Stoner dan Freeman mengatakan: "Manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (The art of getting things done through people)". Usman (2013:6) mengatakan: "Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Argumentasi yang disampaikan di atas adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat pemimpin dan komponen yang dipimpin bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ghazali memberikan gambaran: Biaya pendidikan adalah merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, oleh karenanya untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Dari definisi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat urgent. Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pengelolaan pembiayaan bukan hanya menyangkut dengan bagaimana pengelolaan pembiayaan yang ada tetapi termasuk juga bagaimana upaya kepala sekolah untuk memperoleh pembiayaan pendidikan.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang belum mengikuti petunjuk POS, dapat membuat gagalnya pengelolaan pembiayaan terlebih dengan tidak memfungsikan

pengawas oleh pemerintah untuk ikut andil memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan pada MTsN Ciwaringin Cirebon belum maksimal. Uraian yang disampaikan di atas tentang penggunaan pembiayaan pendidikan teknik pengelolaan pengawasan yang belum sempurna dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada MTsN Ciwaringin Cirebon.

Kajian Kepustakaan Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Usman, 2008). Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “the art of getting things done through people” artinya manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (Usman, 2008).

Manajemen adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (Kamus besar bahasa Indonesia, 2011: 408). Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton mendefinisikan manajemen sebagai “process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently”. Yaitu proses kerja dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses terdiri atas kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugastugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu (Bafadal, 2006). Dari pendapat para ahli manajemen di atas penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu tindakan yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan., pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler siswa dan pengadaan buku pelajaran (Fattah, 2015).

2. Prinsip Manajemen

Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan latihan, melakukan sistem dan besarnya imbalan itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol mengemukakan sejumlah prinsip manajemen menurut (Nanang Fattah, 2015:12) yaitu:

- a. Pembagian kerja : Semakin seseorang menjadi spesialis, maka pekerjaannya juga semakin efisien
- b. Otoritas : Manajer harus memberi perintah/tugas supaya orang lain dapat bekerja.
- c. Disiplin : Setiap anggota organisasi harus menghormati peraturan-peraturan dalam organisasi
- d. Kesatuan perintah : Setiap anggota harus menerima perintah dari satu orang saja, agar tidak terjadi konflik perintah dan kekaburan otoritas.
- e. Kesatuan arah : Pengarahan pencapaian organisasi harus diberikan oleh satu orang berdasarkan satu rencana.
- f. Pengutamaan kepentingan umum/organisasi dari pada kepentingan pribadi.
- g. Pemberian kontra prestasi
- h. Sentralisasi/pemusatan : Manajer adalah penanggung jawab terakhir dari keputusan yang diambil
- i. Hierarki Otoritas : wewenang dalam organisasi bergerak dari atas ke bawah.
- j. Teratur : Material dan manusia harus diletakkan pada waktu dan tempat yang serasi.
- k. Keadilan : Manajer harus adil dan akrab dengan bawahannya.
- l. Kestabilan staf : Perputaran karyawan yang terlalu tinggi menunjukkan tidak efisiennya fungsi organisasi.
- m. Inisiatif : Anggota harus diberi kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencana. Semangat kelompok, Peningkatan semangat kelompok akan menimbulkan rasa kesatuan (Manullang, 2013).

3. Fungsi Manajemen

Sebagai elemen penting bagi seseorang untuk menjalankan pendidikan maupun kepentingan lainnya, manajemen mempunyai beberapa fungsi. Menurut George R. Terry dan Laslie W. Rue. Di dalam dunia pendidikan sendiri ada beberapa fungsi manajemen antara lain:

- 1) Fungsi Perencanaan atau Planning. Fungsi Manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning merupakan hal yang paling penting di dalam suatu manajemen bisnis. Tahukah Anda, perencanaan sangat penting karena berguna untuk menentukan tujuan perusahaan serta upaya yang harus dilakukan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, manajer bertindak sebagai orang yang harus mencari alternatif agar tujuan akhir, mencakup rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, dan juga rencana jangka panjang. Selain itu, manajer juga akan merencanakan serta mengevaluasi tindakan yang telah dijalankan di dalam bisnis. Tanpa sebuah perencanaan, bisnis yang dijalankn tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika hal ini terjadi bisnis yang dijalankan dapat bangkrut dan gulung tikar.
- 2) Fungsi Pengorganisasian atau Organizing. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dalam hal ini, fungsi manajemen yaitu berfungsi untuk membagi kegiatan besar kemudian dijadikan sejumlah kegiatan kecil. Pada umumnya, pengorganisasian ini bisa dilaksanakan dengan cara menentukan apa saja tugas yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan siapa yang harus mengerjakan. Tujuan dari pengorganisasian sendiri yaitu agar dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan agar lebih efektif. Selain itu, penentuan sumber daya untuk berbagai kegiatan yang dibutuhkan juga lebih mudah dan lebih efisien. Jika pengorganisasian ini berjalan dengan baik, tujuan bisnis akan lebih terorganisasi dan terstruktur.
- 3) Fungsi Penempatan atau Staffing. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu penempatan atau staffing. Pada fungsi ini, sumber daya umum seperti perlengkapan, peralatan, dan inventaris lebih diutamakan.
- 4) Fungsi Pengarahan atau Directing. Fungsi manajemen yang keempat yaitu bertindak sebagai pengarahan atau directing. Disini, fungsi manajemen itu sendiri yaitu berfungsi untuk mengupayakan agar orang atau kelompok yang ikut serta dalam bisnis dapat mencapai target dan sasaran yang sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Jika masalah terjadi maka manajer akan

memberi pengarahan agar rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar. Dalam dunia bisnis, kejadian yang tidak terduga bisa saja terjadi. Hal itu tentu membuat rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa saja ada beberapa yang tidak bisa diwujudkan. Nah untuk meminimalisir agar kejadian yang tidak terduga terjadi fungsi manajemen untuk pengarahan mengambil peran yang sangat penting. Fungsi manajemen disini dapat mengarahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh sumber daya bisa sesuai dengan semestinya.

- 5) Fungsi Pengawasan atau Controlling. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu sebagai pengawasan. Setelah tindakan dan rencana sudah dijalankan, selanjutnya pengawasan atau controlling sangat diperlukan untuk mengevaluasi semua kinerja di dalam perusahaan. Nah, disini manajer melakukan pengawasan serta memastikan seluruh kegiatan yang telah dijalankan sudah sesuai atau belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan disini berguna agar penyimpangan dan kesalahan ketika menjalankan tugas bisa dikoreksi agar dapat dijadikan pembelajaran di dalam perencanaan pada tahap selanjutnya (Rue, 2005). Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengawasan antara lain: Routing (jalur) dimana Manajer harus menentukan jalur untuk mengurangi resiko kesalahan; Scheduling (Penetapan Waktu) dimana Manajer harus mempunyai waktu yang rutin untuk menjalankan pengawasan, contohnya satu bulan dua kali; Dispatching (Perintah Pelaksana) dimana Manajer harus mempunyai sikap agar bisa mendorong serta memerintah sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan agar sesuai terhadap waktu yang telah ditentukan; dan terakhir Follow Up (Tindak Lanjut) dimana Manajer mengevaluasi serta memberikan solusi terhadap segala masalah yang terjadi agar tidak terulang kembali.

Pembiayaan Pendidikan

Sekolah sebagai salah satu unit operasional pendidikan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana untuk membiayai kegiatan sekolah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Menurut E. (Mulyasa, 2005). Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak

mengikat. Lebih rinci Dedi Supriadi (2006: 219) mengelompokkan sumber dana sekolah menjadi empat, yaitu: 1) subsidi pemerintah, 2) kontribusi masyarakat, 3) sumbangan lainnya, 4) keluarga siswa. Selanjutnya dijelaskan mengenai bentuk sumbangan/kontribusi yaitu berupa: (1) sarana fisik (gedung, pagar, dll); (2) sarana pendukung proses belajar-mengajar (buku, meubeler, alat peraga, dll); (3) bantuan pendidikan siswa (beasiswa); (4) bantuan lainnya.

Saavedra (2002: 3-4) mengemukakan bahwa sumber utama keuangan pendidikan yaitu: 1) Keuangan Publik, yaitu berupa pengeluaran ataupun alokasi sumber daya dari pemerintah baik pusat, regional, maupun lokal. 2) Sumber Swasta, yaitu termasuk didalamnya rumah tangga, komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kelompok rumah tangga merupakan sumber yang terbesar. 3) Sumber internasional, yaitu sumber daya pendidikan yang berasal dari badan-badan internasional, multilateral maupun bilateral, termasuk pinjaman.

Cohn & Geske menyatakan bahwa biaya pendidikan tidak hanya pengeluaran, tetapi termasuk biaya kesempatan yang beberapa diantaranya merupakan biaya implisit. Sependapat dengan ini, (Mulyono, 2013), menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam bentuk biaya kesempatan (opportunity cost) yang sering disebut income forgone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Hal senada diungkapkan oleh E. (Mulyasa, 2005), yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak selalu identik dengan uang (red cost), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara pendidikan.

Berbeda dari pendapat di atas, (Supriadi, 2006), mengelompokkan biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu: 1) Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak langsung (indirect cost), 2) Biaya Pribadi (private cost) dan Biaya Sosial (Social cost), 3) Biaya dalam bentuk uang (Monetary cost) dan Biaya Bukan uang (Nonmonetary cost), 4) Biaya rutin (routine/recurrent cost) dan biaya investasi/pembangunan (investment/development cost). Biaya langsung adalah semua biaya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, seperti biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya

kesempatan. Menurut Mulyasa, biaya tidak langsung disebut juga hidden cost yang dapat dibedakan menjadi 1) biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah dibandingkan seandainya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang), 2) nilai pengecualian pajak, dan 3) imputed cost depresiasi dan bunga dalam hubungannya dengan biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah. Biaya pribadi yaitu pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk pendidikan (household expenditure) seperti uang sekolah, pembelian buku dan perlengkapan siswa lainnya. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun pemerintah untuk membiayai pendidikan. PP Nomor 48/2008 Pasal 3 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan, biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan sekolah, mengemukakan unsur-unsur pokok model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, yaitu: 1). Program atau kegiatan, unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana secara efektif dan efisien; 2) distribusi dan alokasi dana, unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM; 3) sumber dana, unsur ini memberikan gambaran tentang darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan; dan Program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam melaksanakan PBM, sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran, yang ingin dicapai yaitu: (1) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler; (3) penentuan standar kompetensi lulusan; (4) peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; (6) penyediaan alat peraga edukatif atau media/multimedia

pembelajaran dan bahan habis pakai untuk kepentingan kegiatan belajar siswa; (7) penyediaan buku referensi dan buku teks pelajaran untuk di perpustakaan; (8) penerimaan siswa baru; (9) bantuan bagi siswa miskin; dan (10) kegiatan ulangan harian, semesteran, tahunan dan UN.

Mutu Pembelajaran

1. Konsep Mutu Pembelajaran

Menurut Garvin dan Davis yang dikutip oleh Abdul Hadis dan Nurhayati, berpendapat bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan pelanggan (Nurhayati, 2010). Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif (Abdul Hadis & Nurhayati, 2010: 86). Dalam artian ini mutu berarti suatu proses yang terus meningkatkan suatu kualitas agar tercapai keunggulan-keunggulan dalam proses pendidikan.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar sehingga ada perubahan perilaku individu peserta didik itu sendiri. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti kecakapan, kebiasaan, sikap, penerimaan atau penghargaan (Sanjaya, 2016).

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan mutu pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dengan peserta didik melalui sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pembelajaran hingga berjalan dengan efektif dan efisien, guna dapat menabuh nilai mutu pembelajaran hingga mutu suatu lembaga pendidikan.

Konsep peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma baru pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia faktor kualitas pendidik senantiasa dituntut mendapatkan perhatian yang serius. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru sudah memiliki antara lain kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat, sertifikat pendidik diperoleh

guru setelah mengikuti pendidikan profesi, sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kunci utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu memiliki komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang baru dalam mengajar dan membantu dalam perkembangan peserta didik.

2. Indikator Peningkatan Mutu

Pembelajaran Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pertama, hasil akhir pendidikan. Kedua, hasil langsung yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan. Ketiga, proses pendidikan. Keempat, instrument input alat interaksi dengan raw input (peserta didik). Kelima, raw input dan lingkungan. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu akan melibatkan berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasana, dan dapat menciptakan suasana yang kondusif.

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mutu pendidikan adalah hasil akhir pendidikan, hasil langsung pendidikan yang dipakai sebagai tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan, proses pendidikan, instrument input yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa), dan raw input dan lingkungan proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar yang dipertimbangkan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, metodologi yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru, sarana sekolah dukungan administrasi, sarana prasarana, dan penciptaan suasana yang kondusif. Semua input tersebut saling berkaitan dengan semua komponen dalam interaksi proses belajar mengajar. Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan.

Bahan dan Metode

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran. Sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu data yang disajikan

dalam bentuk verbal yang dinarasikan lewat kata-kata (Noeng Muhadjir, 2016: 20). Adapun lokasi yang dipilih adalah MTsN Ciwaringin Cirebon dengan subjek penelitian kepala sekolah, guru, bendahara sekolah dan komite. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai human instrument, dalam rangka mencari data dan informasi langsung dari sumber nya, dengan menangkap berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. Uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan empat pengujian, yaitu Uji kredibilitas, Transferebelitas, Dependabilitas, dan Kompirmabilitas.

Diskusi/Pembahasan

Peran kepala sekolah dalam perencanaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Dalam rangka mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memprioritas hal-hal yang penting dan mendesak.

Teknik pengelolaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Pengelolaan sumber dana pembiayaan pendidikan telah dilaksanakan berdasarkan standar yang telah di bebaskan oleh pemerintah kepada sekolah sebagai ujung tombak pengelolaan pendidikan. Adapun standar tersebut adalah: a). Standar Kelulusan b). Standar isi c). Standar pengelolaan pendidikan d). Standar Pembiayaan pendidikan e). Standar penilaian pendidikan f). Standar proses g). Standar pendidik dan tenaga kependidikan h). Standar sarana dan prasarana. Pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah akan mengutamakan hal-hal yang paling prioritas yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga biaya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon.

Pengawasan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon telah berlangsung dan berjalan yang didasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan yang berlaku, baik pengawasan yang dilakukan

secara intern maupun ekstern sekolah. Pengawas yang mengawasi pembiayaan ini adalah berbagai pihak-pihak yang berwenang, seperti pengawasan intern dilakukan oleh Kepala Sekolah, Team Pengawas jenjang Tsanawiyah dan komite sekolah. Sedangkan secara eksternal pengawasan dilakukan oleh bagian Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Inspektorat dan BPK, Kementerian agama Kabupaten Cirebon sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing dalam mengawasi pembiayaan yang ada pada MTsN Ciwaringin Cirebon.. Menyangkut dengan prinsip pengawasan menurut Undang- Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan akan memberikan terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Hambatan dalam pengelolaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dan guru terhadap pembiayaan pendidikan adalah dana yang telah diterima, tidak sesuai antara rencana penggunaan keuangan dengan realisasi yang dilaksanakan dilapangan, sehingga terjadi apa yang disebut penciutan dana dari apa yang telah direncanakan, kurang pahamnya para pengelola keuangan baik kepala sekolah, bendahara, dan dewan guru dalam pengelolaan keuangan. Lebih lanjut kendala atau hambatan yang di alami oleh kepala sekolah, bendahara, dan para dewan hambatan yang lain adalah adanya tuntutan dari pihak- pihak lain yang seharusnya tidak dibebankan kepada pembiayaan pendidikan. Pemungutan pembiayaan seperti ini akan mengurangi hal-hal strategis yang seharusnya menjadi prioritas utama dari penggunaan pembiayaan pendidikan. Sehingga akan terabaikan apa yang telah terencana dalam RKAM (Rencana Kerja Anggaran Madrasah).

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
(1) Peran kepala sekolah dalam perencanaan sumber dana pembiayaan pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. Dalam rangka mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan pendidikan yang direncanakan

tersebut dengan memprioritas hal-hal yang penting dan mendesak. (2) Teknik Pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah akan mengutamakan hal-hal yang paling vital yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga biaya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada MTsN Ciwaringin Cirebon. (3) Pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan internal dan eksternal. Secara internal dilakukan oleh kemenag kabupaten atau provinsi, sedangkan dari pihak eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat berbagai pihak-pihak yang (4) Hambatan yang dialami dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terbagi kepada dua permasalahan, yaitu yang pertama berbedanya perencanaan dengan biaya yang diterima dari pemerintah, yang kedua pembayaran uang Komite sekolah tidak terlaksana secara rutin setiap bulan yang disahkan.

Referensi

- Bafadal, I. (2006). No Title. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Sentralisasi*.
- Fattah, N. (2015). landasan manajemen pendidikan. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Manullang. (2013). *dasar - dasar manajemen*. Jakarta. Gya Indonesia.
- Mulyasa, E. (2005). *menjadi kepala sekolah profesional*. Rosdakarya Bandung.
- Mulyono. (2013). *konsep pembiayaan pendidikan*. Jakarta. Arruz Media.
- Nurhayati, Abdul Hadis &. (2010). *manajemen mutu pendidikan*. Alfabeta Bandung.
- Rue, George R. T. dan Leslie W. (2005). *dasar - dasar manajemen*. Jakarta Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. (2016). *strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta, Prenadamedia.
- Supriadi, D. (2006). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Rosdakarya.
- Usman, H. (2008). No Title. *Manajemen: Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*, 20(1), 34.